



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GETREDA MELSINA HEHANUSSA
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 155255

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 150.937.500

1. Tanah Seluas 685 m2 di SORONG, HASIL SENDIRI Rp. 90.562.500
2. Tanah Seluas 2500 m2 di SORONG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 60.375.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 181.800.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SX SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 176.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 67.002.100

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 151.965.013

F. HARTA LAINNYA Rp. 20.000.000

Sub Total Rp. 571.704.613

III. HUTANG Rp. 28.947.200

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 542.757.413

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.